

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia terletak di bawah garis katulistiwa di tambah dengan sumber daya yang alamiah yang membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam bidang industri. Pada masa pra-sejarah Indonesia tidak dapat terpisahkan dari dunia pelayaran niaga Asia pada umumnya. Sejak berabad-abad pertama masehi Indonesia telah berintraksi dengan kawasan-kawasan lain di Asia melalui jalur pelayaran niaga. Melalui jalur pelayaran ini juga Indonesia bersentuhan dengan peradaban-peradaban Hindu-Buddha dan Cina yang memperkaya kehidupan penduduknya. Pada jaman itu perkembangan ekonomi di Asia termasuk Indonesia telah maju dan berkembang serta berkuasa luas terhadap perekonomian dunia lain terutama Eropa dan sejalan dengan perkembangannya maka kapal-kapal Eropa mulai mencari jalan berlayar ke Asia. Dan pada abad ke-16 berbagai perusahaan dagang terutama dari Spanyol dan Portugis mulai menempuh pelayaran ke Asia terutama Indonesia untuk berniaga dan menanamkan bursa besar di suatu tempat yang diinginkan.

Pada masa pra-sejarah atau pada masa-masa manusia purba *Pithecanthropus modjokertensis*, *Meganthropus paleojavanicus* mereka hidup berburu dan mengumpulkan makanan merupakan corak kehidupan yang menjadi pokok dari tingkat perkembangan kebudayaan pertama kegiatan ekonominya sangat bergantung pada alam dan lingkungan hidup. Dan pada permulaan tahun masehi

manusia di Indonesia sudah hidup dan menetap di gua-gua hal ini di buktikan dengan adanya hasil karya manusia yang berupa lukisan-lukisan di dinding gua. Di samping itu juga telah menunjukkan peningkatan kehidupan dengan ditemukannya benda-benda dan alat-alat yang terbuat dari logam.

Pada masa kedatangan VOC, kota-kota dagang telah tumbuh dengan sendirinya di Indonesia kota-kota dagang tersebut adalah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dan alat perekonomian berupa uang sudah mulai ada bahkan sejak kerajaan Mataram Kuno uang telah di kenal terbuat dari logam emas, tetapi perdagangan berupa sistem barter memang berlaku.

Keadaan ekonomi di Indonesia pada masa bekas jajahan kolonial lebih bersifat yuridis-politis sistem ketata-negaraan lebih bersifat ekonomis. Struktur ekonomi pada masa kolonial adalah struktur ekonomi yang berorientasi, berpusat dan mengabdikan pada kepentingan Negara induk atau Negara penjajah yang pusatnya adalah kepentingan penduduk atau Negara induk timbulnya daerah jajahan yaitu dimulai dengan usaha untuk mencari keuntungan dari usaha dagang di daerah jajahan. Pada masa pemerintahan VOC Indonesia adalah Negara yang lebih bersifat terbelakang artinya sistem perekonomian dan perdagangan di Indonesia pada masa VOC masih bersifat menguasai daerah jajahan. VOC pada akhir abad ke-18 dengan beralihnya kekuasaan VOC ke tangan Hindia Belanda pengaruhnya di bidang perekonomian di Indonesia sangat besar, karena perekonomian Belanda di daerah jajahan adalah tempat untuk mengadu untung dan tempat mendapatkan barang dan jasa yang di butuhkan oleh Hindia Belanda. Daerah jajahan merupakan

tempat yang layak untuk berinvestasi akan tetapi daerah jajahan tersebut mengalami kerugian yang sangat besar.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh Inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank.

Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Pada saat kesulitan ekonomi

menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Uang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

Pada masa pemerintahan Syafruddin kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950

berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah berusaha melakukan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

- Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun

beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

- Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
- Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
- Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia pada masa lahinya orde baru sampai saat ini, perlu memperhatikan pokok-pokok pikiran yang mendasari pola perkembangan ekonomi di Indonesia perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang yang di tempuhnya agar bertujuan untuk mengembangkan perkonomiannya sedemikian rupa. Menurut teori pertumbuhan mengatakan bahwa dengan mengutamakan pertumbuhan perekonomian secara otomatis maka golongan yang berpendapatan rendah akan mendapatkan cipratan penghasilan dari kelompok berpendapatan tinggi melalui sistim donasi maupun sistim perpajakan progresif.

Perkembangan perekonomian masa orde baru mulai berkiprah pada tahun 1967, pada awalnya perekonomian masa orde baru mewarisi perkembangan perekonomian yang tidak menguntungkan dengan tingkat inflasi yang tinggi

(600% per tahun pada tahun 1966) di samping tingkat kemunduran ekonomi dan pengatingguran yang parah. Namun sejaak tahun 1976 sampai menjelang akhir kekuasaannya 1997 pemerintahan orde baru mulai mampu dan menciptakan laju pertumbuhan ekonomirata-rata sekitar 7% pertahun. Namun terjerat dengan adanya krisis moneter dan disusul dengan krisis ekonomi hingga akhirnya krisis politik yang menyebabkan kenaikan tingkat inflasi menjadi lebih tinggi mendkati 100% per tahun yang terparah oleh merosotnya secara drastic krus devisa yang berupa jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Etnis Cina merupakan warga asing telah menjalin kontak dengan nusantara sejak lama, jauh sebelum kolonialisme Portugis merambah Nusantara. Pada masa Sriwijaya telah ada hubungan dagang antara Nusantara dengan Cina dan bahkan menurut Kobkua, sejarawan, menilai bahwa Sriwijaya adalah agen dagang dari Cina dan pada waktu itu Sriwijaya tunduk kepada Cina untuk melindungi dan menyelamatkan kepentingan ekonominya. Sejak pembangunan kota Batavia oleh VOC (*Vereniging Oost Indische Compagnie*) tahun 1619, orang-orang Cina banyak yang berdatangan ke Batavia dikarenakan Batavia telah menjadi kota dagang yang besar dan akan membawa peruntungan yang lebih baik. Mereka berdatangan ke Batavia baik secara legal maupun ilegal. Jika mereka datang secara ilegal, biasanya mereka diturunkan di sekitar kepulauan seribu, bukan di pelabuhan Batavia.

Etnis Cina dengan cepat membaur kedalam kehidupan ekonomi masyarakat pribumi dan juga dengan orang Eropa. Menurut Retno Winarni, sejarawan, di

wilayah Cirebon , sebuah laporan resmi pihak Belanda dari tahun 1711, menyinggung tentang bagaimana akrabnya integrasi yang telah terjadi antara orang-orang Cina dan elite bangsawan Jawa dikalangan istana. etnis Cina pun berhasil menjadi pengusaha-pengusaha dengan membuat pabrik di wilayah Batavia. Mereka pun terkadang diandalkan oleh VOC sebagai teknisi-teknisi. Orang-orang VOC lebih banyak mempercayai orang Cina ketimbang orang pribumi itu sendiri dikarenakan VOC takut kalau-kalau pribumi memiliki kekuatan maka pribumi akan memberontak terhadap VOC, maka dari itu sebisa mungkin VOC mengekang pribumi dan lebih mengutamakan orang-orang Cina untuk mengisi jabatan penting seperti *syahbandar*, pejabat yang mengatur segala urusan di pelabuhan dari mulai penarikan cukai hingga perselisihan antar pedagang. Peran etnis Tionghoa di bidang ekonomi semakin meluas pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan Demokrasi Terpimpin. Keberhasilan usaha mereka dalam menagmbil alih perusahaan-perusahaan besar belanda yang di nasionalisasikan juga tidak kalah memiliki arti strategis bagi kelanjutan dan pertumbuhan bisnis mereka di Indonesia.

Selanjutnya pada masa kedatangan etnis Cina di daerah Gorontalo lebih cepat membaur kedalam kehidupan ekonomi masyarakat pribumi atau masyarakat Gorontalo. Peran etnis Cina di bidang ekonomi semakin meluas karena jauh dalam pandangan mata orang Tionghoa di Gorontalo mereka lebih banyak membuka usaha dan membuka suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat.



Keberhasilan etnis Tionghoa dalam bidang bisnis telah diwarisi dalam sifat-sifat yang mendukung keberhasilan tersebut seperti sifat disiplin, teliti, bertanggung jawab, kerja keras, sabar dan kreatif.

Dengan demikian, perkembangan perekonomian di daerah Gorontalo semakin meluas, dan membuahkan hasil yang lebih baik serta dapat membuka sebuah lapangan pekerjaan yang merata. Maka, dari latar belakang yang dikaji di atas, penulis mengangkat tema yaitu **“ETOS KERJA ETNIS TIONGHOA DI GORONTALO. (Suatu Penelitian di Kota Gorontalo).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian tentang latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana proses kedatangan etnis Tionghua di Gorontalo hingga terjadi proses interaksi sosial.
2. Bagaimana peran etnis Tionghua di bidang pendidikan, politik, dan ekonomi.
3. Bagaimana etos kerja etnis Tionghua di Gorontalo.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. untuk lebih mengetahui proses kedatangan etnis Tionghua di Gorontalo hingga terjadinya interaksi dengan masyarakat lokal.

2. Peran etnis Tionghua di Gorontalo dalam bidang Pendidikan, Politik, dan Ekonomi,
3. Etos kerja etnis Tionghua di Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil-hasil dari penelitian yang di adakan manfaatnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :

1. Secara akademik : penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca yang berada di lingkungan kampus secara umum.
2. Secara peneliti : dapat menjadikan bahan implementasi dalam membangun pekerjaan secara disiplin.
3. Secara umum : dapat di jadikan suatu referensi bagi masyarakat umum untuk membangun sebuah kreatifitas dan disiplin dalam pekerjaan.